



Pemkot Harus Sosialisasi

LANGKAH Pemkot Yogyakarta memberikan solusi kepada penunggak PBB dengan cara mengangsur untuk membayarnya, dinilai Forpi Kota Yogyakarta patut diapresiasi. Ini artinya ada upaya konkret untuk menyelesaikan persoalan yang diduga bermula dari sengketa database.

"Memang solusinya tidak untuk diputihkan semua tunggakan pajaknya. Tapi harus

dibayar dengan cara mengangsur. Cuma, prosedurnya seperti apa mengakses solusi itu, warga harus diberitahukan lebih detail. Sehingga semua info clear," urai Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, kemarin.

● ke halaman 14

Pemkot Harus Sosialisasi

● Sambungan Hal 13

Proses dan prosedurnya yang disampaikan ke publik mengenai hal tersebut, adalah hal yang tak bisa ditarwar. Termasuk kapan warga yang menunggak pembayaran PBB diberi batas waktu untuk melunasinya.

"Jangan sampai warga tidak tahu. Informasi seperti itu bisa disampaikan melalui kelurahan, bahkan sampai RT-RW," lanjut Kamba.

Mengenai adanya potensi database yang tak rapi saat migrasi dari KPP Pratama ke pemerintah daerah untuk pembayaran PBB, Kamba menyatakan jika persoalan itu harus segera dilacak untuk kemudian dilakukan perbaikan. Apalagi

dengan kemajuan teknologi informasi, kemungkinan bisa mempermudah proses tersebut.

"Yang penting datanya utuh saat migrasi itu. Karena dengan begitu, akan diketahui berapa yang sudah melunasi atau masih menunggak. Jangan sampai tagihan tertukar, atau tidak sinkron dengan data-data yang dimiliki wajib pajak," pungkasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005